

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OELH ANAK**

(Studi Putusan No.242/Pid.Sus-anak/2015/PN.Makassar)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

ISMA SARI IKBAL
NIM.10500113004

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Isma Sari Ikbal
Nim : 10500113004
Tempat/Tgl. Lahir : Enrekang/16 April 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jln. Sukaria 13
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
yang dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.242/Pid.Sus-
anak/2015/PN.Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Mei 2017
Penyusun,

Isma Sari Ikbal
NIM : 10500113004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 242/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN.Makassar)", yang disusun oleh saudara Isma Sari Ikbal, NIM: 10500113004, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah memenuhi syarat untuk diuji dan dipertahankan pada Seminar Hasil dan sidang *munaqasyah* dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Samata, 8 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekertaris : Istiqamah, SH.,MH
Munaqisy I : Dr. Hamsir, M.Hum
Munnaqisy II : Ansar Sinilele., SH., MH
Pembimbing I : Ahkam Jayadi.,SH.,MH
Pembimbing II : Dr. Jumadi, SH., MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui oleh:

Dekan Fakutas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (studi putusan nomor 242/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Makassar)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alaimin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda ikbal dan ibunda hasmiati yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun serta saudara-saudariku ku yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.

5. Bapak Ahkam Jayadi S.H.,M.H, dan bapak Dr Jumadi S.H.,M.H. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Hamsir, SH.,MH dan Bapak Azhar Sinelele,S.H.,MH selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepada sahabat kupenghuni kelas Ilmu Hukum A, Andi Tenri Wali dan Anita Utrujah Abdullah yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, kalian luar biasa
10. Kepada Nia Arianti, Jumriati, Rini Rianti, Enjelia, Mustafa, Irmawati. Yang telah memberikan dukungan dan semangat, terimah kasih untuk kebersamaannya selama selama ini.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
12. Keluarga KKN-R Angkatan 53 se-kecamatan Tinggimoncongyang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Keluarga besar KKN-R Angkatan 53 Kelurahan Malino yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

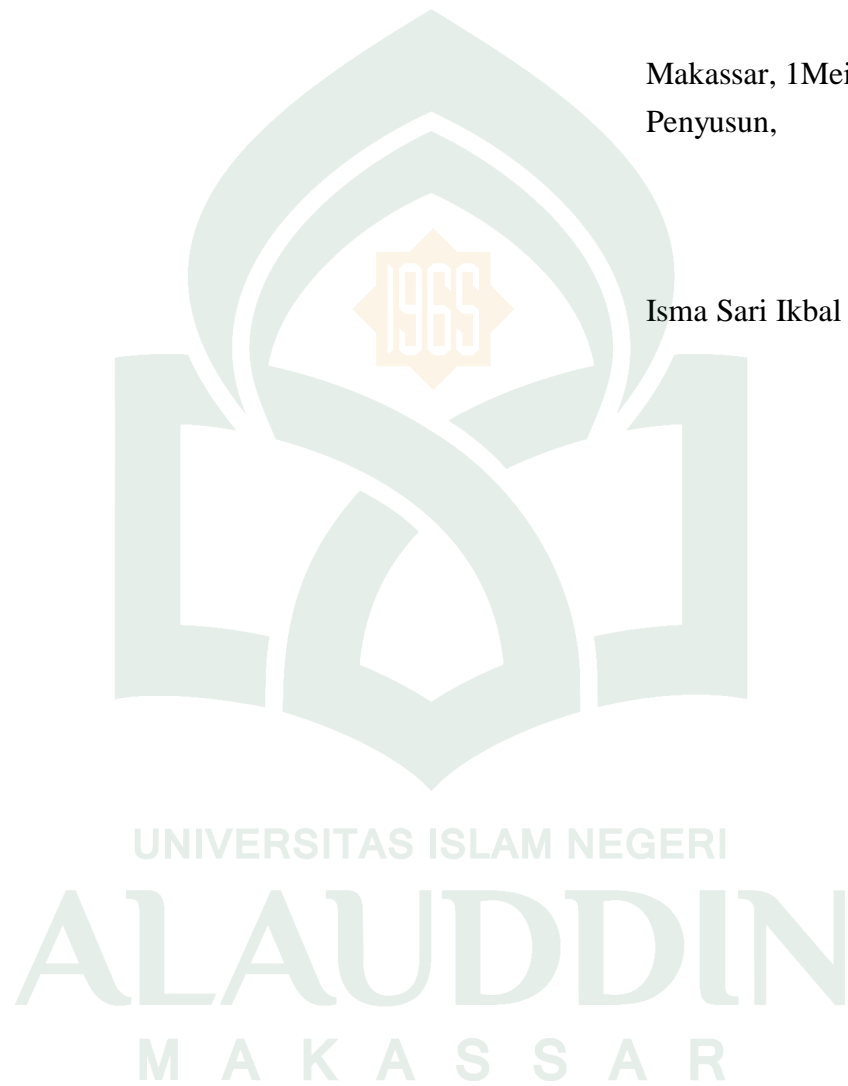
Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat

untuk semua orang.

Makassar, 1 Mei 2017

Penyusun,

Isma Sari Ikbāl



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. KajianPustaka.....	7
E. TujuandanKegunaanPenelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-21
A. Pengertian Umum Mengenai Anak	10
1. Pengertian Anak	10
2. Sanksi dan Tindakan bagi Anak Nakal	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	21-30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum mengenai Penganiyaan.....	31-43

1. Pengertian Penganiayaan.....	31
2. Unsur-unsur penganiayaan.....	36
3. Jenis-jenis penganiayaan.....	37
D. Ketentuan Pidana yang mengatur tentang perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh anak.....	43-44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45-48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV Hasil Penelitian	49-74
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar	49
B. Dasar Penerapan Hukum Pidana Formil dan materil terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakuakn oleh Anak.....	53
C. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak	63
BAB V PENUTUP.....	75-77
A. Kesimpulan	75
B. Implikasi Penelitian.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----



ABSTRAK

Nama : Isma Sari Ikbal
Nim : 10500113004
Fak/Jur : Syari'ah & Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Anak (studi putusan No. 242/Pid. Sus-Anak/2015/ PN. Makassar)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh anak. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Makassar. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (studi putusan nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN Makassar).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini penggolongan data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian (1. Dasar penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap putusan no. 242/pid.sus-anak/2015/Pn.Makassar terdapat kekeliruan karena dalam penerapan pasal yang didakwakan tidak men-Junctokan Pasal 76 C, Dari unsur-unsur tindak pidanya, unsur pertama dan kedua terdapat dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan unsur ke dua tedapat pada pasal 76 C. (2. pertimbangan hukum hakim terhadap putusan no. 242/pid.sus-anak/2015/Pn.Makassar terdapat kekeliruan hakim hal ini karena ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu berat karena mengingat bahwa terdakwa dalam kasus ini bukanlah pelaku utama atau penyebab utama meninggalnya korban.

Implikasi penelitain yaitu: 1. Pihak keluarga merupakan benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan sangat penting dalam mendidik anak. 2. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah teliti dan cermat, mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku di dalam persidangan. Selain itu jaksa penuntut umum haruslah memiliki pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya secara unsur formill, melainkan juga secara unsur materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan. 3. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak serta merta

mendasar pada tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan hakim juga harus mempertimbangkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan anak terutama di bidang pendidikan, pembinaan ahlak dan perilaku..



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi, bangsa dan Negara ke depan¹. Disebutkan dalam pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.²

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

¹ Permata press. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2007. h 284.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XIV, Pasal 34.

Keberadaan anak yang ada dalam lingkungan kehidupan ini memang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa terkadang seorang anak melakukan lepas kontrol. Ia dapat melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain atau bahkan dirinya sendiri.

Dalam ajaran Islam, manusia selalu diajarkan dengan hal-hal yang baik terutama dalam membina keluarga karena pembinaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya haruslah mendidik dengan baik, sesuai dengan Q.S. At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman peliharlah dirimu dan keluargamu dari api nereka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar, yang keras yang tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S At-tahrim/66:6)³

Maksud dari ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan manusia untuk membina keluarga yang sakinah terutama pada anak yang rentan sekali melakukan kejahatan yang disebabkan oleh lingkungan dan didikan orang tua yang kurang perhatiannya sehingga anak mencari perhatian kepada orang dengan jalan yang tidak baik seperti kenakalan yang meresahkan masyarakat.

³ KementrianAgama,RI.,Al-Qur'an dan Terjemahannya(Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 34

Sebagian anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkadang tidak mengenal status sosial dan ekonomi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor yang merugikan perkembangan pribadinya. beberapa faktornya yaitu pada masa pertumbuhannya sikap dan mental anak tersebut belum stabil, juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya, dan juga karena adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, yang membawah dampak terhadap kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pembentukan karakter anak dimulai sejak dini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral yang baik terhadap perilaku anak, baik itu dimulai dari keluarga, agama, pendidikan dan juga lingkungan.

Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindak pidana saat ini yang cukup menarik perhatian adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berbagai perbuatan atau tingkah laku anak yang melanggar hukum perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya. Walaupun telah dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitar banyak mempengaruhi anak sehingga melakukan tindak pidana hal ini dikarenakan oleh bujukan, spontanitas atau hanya sekedar ikut-ikutan.

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Selain itu

penganiayaan dianggap perbuatan yang tidak berprikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama penganiayaan adalah suatu yang dilarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena sosial yang muncul didalam masyarakat dimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara khusus dan tegas oleh para penegak hukum untuk melindungi, menjamin hak, dan kepentingan anak, terkhusus kepada anak yang melakukan tindak pidana. Adapun masalahnya adalah apakah anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan sama dengan orang dewasa. Tentunya sangat tidak adil jika sama dengan pidana terdakwa dewasa apalagi mengingat bahwa anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggung jawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan kepentingan colonial belanda tetapi juga perilaku peradapan manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih dari peraturan yang ada.

Perbedaan perlakuan dan ancaman ppidanaanya yang diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa

depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Konvensi anak juga menyatakan bahwa anak berusia dibawah 18 (delapan belas tahun), diasumsikan tidak dapat melakukan kejahatan atau *doly incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.

Berkaitan dengan itu terkadang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi si pelaku. Terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan perhatian khusus untuk tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan hukum demi keadilan.⁴

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah penganiayaan terkhusus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Makassar dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (studi putusan No.242/ Pid. Sus-anak/ 2015/ PN. Makassar)”**.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta,refika Aditama ,2009), hal-75

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap putusan No. 242/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Makassar ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No. 242/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Makassar ?

C. Fokus penelitian dan deskripsi fokus

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (studi putusan No.242/ Pid. Sus-anak/ 2015/ Pn .Makassar)”. Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di kota Makassar.

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.⁵
- b. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana.⁶
- c. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).⁷

⁵ Wijono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2016), h.12.

⁶Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Jakarta: CV Armico), hal.115.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini adapun yang memiliki relevansi dengan judul penulis sebagai berikut :

Abintoro prakoso dengan bukunya pembaruan sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Di dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa perlindungan hukum bagi anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Pembahasan yang termuat dalam buku ini memiliki pembahasan yang cukup luas terkait dengan peradilan pidana anak. Hal ini terkait dengan penelitian yang akan membahas mengenai penerapan saksi pidana materil dan formil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Lamintang dan Theo Lamintang dengan bukunya kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa masalah kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan sebagian jenis kejahatan kedua yang paling banyak terjadi sehari-hari. Dalam buku ini membahas mengenai penganiayaan. Hal ini terkait dengan penelitian yang akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis serta sanksi dari penganiayaan itu sendiri.

⁷ <http://balance04.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>

Abdussalam dan Adri Desasfueyanto dengan bukunya yaitu Hukum Perlindungan Anak. yang menjelaskan materi-materi hukum perlindungan anak baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Hukum perlindungan anak sebagai hukum positif dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak dari sejak dalam kandungan, dilahirkan sampai berumur 18 tahun untuk membentuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang kuat, kokoh dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim secara formil dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar.
 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim secara materil dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh di kota Makassar.
- b. Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah :
 1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai dasar pertimbangan hakim secara formil dan materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh nakal.

2. Memberikan informasi dalam perkembangan hukum umunya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.



BAB II

Tinjauan teoretis

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian anak

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut pakar, pengertian menurut sosiologi Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum pengertian anak yang kita ketahui adalah orang yang belum dewasa atau belum menikah.

Berikut ini menurut beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan

Menurut kitab Undang-Undang pidana, dalam pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut kitab Undang-Undang hukum pidana dalam pasal 45, anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau dari batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) dan apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan⁶

⁶Abdssalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), h .5

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan sebagai generasi sebelumnya.

Adapun pengertian anak menurut pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab, masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya⁸.

Pengertian anak menurut sosiologis bukan semata-mata di dasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

⁷ Abintoro prakoso, *Pembaruan System Peradilan Pidana Anak*(Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), h. 17.

⁸ Siska lis sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*(Bandung: Refika aditama, 2015), h. 15

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa, “anak adalah manusia yang masih kecil”, atau “ anak-anak yang kecil (belum dewasa).⁹ Anak dalam pengertian bahasa sangat banyak yaitu keturunan kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumput tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.¹⁰

Ditinjau dari aspek psikologis seorang anak adalah apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun dapat dilihat juga dari pertumbuhan perkembangan jiwa yang dialaminya. sedangkan jika lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang dan propaganda seperti pada masa remaja awal.¹¹

adapun pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yaitu :

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 31.

¹⁰ Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*(Bandung; Alumni, 1992), lihat Darwin parint, *hukum anak Indonesia*(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h. 4.

¹¹ Nandang sambas,sh.,m.h. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasiaonal Perlindungan Anak Serta Penerapan* (Yoyakarta: Graham Ilmu, 2013), h. 3.

menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa selama ditubuhnya masih ada berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan belum akan jadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita, dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.

Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama merumuskan dengan

Menarik batasan antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya walaupun ia belum pernah kawin.

Adapun menurut hukum positif usia belum dewasa dan usia dewasa diatur dalam hukum positif Indonesia, biasanya terdapat dalam KUHPidana, KUHPerdara, komplikasi hukum Islam, hukum adat Indonesia, putusan mahkamah agung dan sebagainya. Yaitu :

- a. Menurut kitab Undang-Undang perdata (*burgelijk wteboek*) pada Pasal 330 “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”
- b. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 “anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun”

- c. Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 “anak adalah setiap orang berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 8 “anak didik permasyarakatan adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun, anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur delapan belas tahun,anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 ayat (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- f. Komplikasi hukum islam Pasal 98 ayat 1 batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan.
- g. SK Mendagri Dirjen Agraria pendaftaran tanah (kadaster) No.Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-71977, mengenai soal dewasa dapat diadakan perbedaan dalam:
 - 1. Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu
 - 2. Dewasa *seksuil*, misalnya batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan

3. Dewasa hukum, dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap bertindak dalam hukum.

Dari aspek agama Islam pengertian anak disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang Arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang *transcendental* dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan.¹² Dalam hal ini hukum islam menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun dan belum balig. Sedangkan dengan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balig apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.¹³

2. Sanksi dan Tindakan bagi anak nakal

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, *psikologis* dan *paedagogis*, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun ini belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Di samping itu juga perlu diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan

¹² Imam Juahari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 46.

¹³ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h.369.

lingkungannya. Di samping itu hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan pasal 70, menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

1. Sanksi pidana

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 tahun (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁴

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman kurungan hukuman pokok terdiri dari :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau sementara waktu.

¹⁴ Muh Taufik Makaro dan Weni Bukamo dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga*(Ineka cipta,2013), h.88.

c. Dan hukuman denda

Hukuman tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu ; dan
- c. Pengumuman keputusan hakim

Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang system perdilan pidana anak tidak mengikuti ketentuan saknsi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara sendiri. Pidana untuk anak dimuat pada pasal 71 sampai dengan pasal 81

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:

- 1. Pembinaan diluar lembaga
- 2. Pelayanan masyarakat; atau
- 3. Pengawasan

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Dan penjara

f. Pidana tambahan terdiri atas :

- 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2. Pemenuhan kewajiban adat

- g. Apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dan denda diganti dengan pelatihan kerja.
- h. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar hak dan martabat anak.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

2. Sanksi tindakan

Pasal 82

(1).Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

(2). Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dikenakan paling lama 1(satu) tahun.

(3). Tindakan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 83

- (1) Tindak pidana penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan¹⁵

Secara formil di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Baru seacara formal didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat (1) jo. Ayat (3)).¹⁶

Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁷

¹⁵ Abintoro prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja, 2016), h. 88.

¹⁶ R.Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika: jakrta timur, 2016), hal. 38.

¹⁷ Hadi supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 196.

Menurut pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Di dalam UU No.11 tahun 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restorative”, kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan:

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang berdasarkan pembalasan.

Di dalam Naskah akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan

- f. Mendorong masyarakat berpartisipasi
- g. Meningkatkan keterampilan anak.¹⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang- Undang (tindak pidana)”.¹⁹

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, atau pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan menurut Undang-Undang

¹⁸ M.nasir djamil, *Anak Bukan Di Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 133.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cet. V; Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2007), h. 92.

merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pembuatan pidana atau tindakan pidana.²⁰

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar anantara lain. *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh pompe sebagaimana dikutip dari buku karya lamintang, sebagai:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

Simons mengartikan sebagai mana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum “.

Sementara jonker merumuskan adalah “*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah

²⁰ Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Yogyakarta: Renggang Education dan pupuk Indonesia, 2012), H. 20.

diterimah oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Adapun Utrecht dalam bukunya hukum pidana I menggunakan istilah peristiwa pidana. Alasannya bahwa peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen positive*) atau suatu melainkan (*verzuim atau nalaten, niet-doen-negative*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karna perbuatan itu).

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana,

Menurut Utrecht yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah “suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.

Menurut karni memberikan pengertian bahwa “ delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya, dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan”.

Adapun menurut Moeljatno yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat adalah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana,
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, orang mati, dan badan
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik,
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya)

Jonker dan Utercht berpendapat rumusan Simon merupakan rumusan paling lengkap karena meliputi :

- 1. Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2. Bertentangan dengan hukum
- 3. Dilakukan oleh orang-orang yang bersalah
- 4. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkain perbuatan yang diletakkan sanksi pidana.²¹ Van Hammel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaaring en aan schuld te wijen* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum dan patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana itu sendiri dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbrfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh pakar dilatar belakangnya oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur perbuatan pidana adalah

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana unsur melawan hukum yang objektif

³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Makassar: mitra wacana media, 2014), h. 193.

d. Unsur melawan hukum yang subjektif²²

Unsur-unsur delik atau pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Unsur tersebut diantaranya adalah

- a. Niat
- b. Maksud dan tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan
- d. Kemampuan bertanggung jawab

Asas hukum pidana menyatakan *an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) kesalahan yang dimaksudkan adalah kesalahan oleh kesegajaan (*intention/opzet/doluz*) dan kealpaan (*negligence or schuld*) para pakar pada umumnya menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewutzijn*)
3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

⁴Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*(Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193.

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua yakni :

- a. Tak berhati-hati
 - b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
2. Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku. Terdiri atas: Perbuatan manusia, berupa:
- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau perbuatan membiarkan.

1. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

2. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain ;

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan pada saat setelah perbuatan dilakukan
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa :

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kemudian Satochid menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur dari perbuatan, yakni;

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)

Menurut Lamintang unsur delik terdiri dari dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. dan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu yaitu;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk lebih itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP

“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu lama dua puluh tahun”

5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya”

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederechtelijk*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berikut.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- (1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overterdigen*) dimuat dalam buku III.
- (2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*material delicten*)
- (3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)
- (4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- (5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadiya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- (6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- (7) Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu)

- (8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
- (9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diper ringan (*geprivilegieerde delicten*)

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap denda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap anak baik, terhadap kesusialaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan anatar tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samegestelde delicten*)²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Penganiayaan

1. Pengertian penganiayaan

Diatur dalam buku II BAB XX KHUP mulai pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab undang-undang hukum pidana, namun demikian dalam undang-undang ini tidak diberikan penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

²³ Adam Chazawi, *sh.stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta; pt rajagrafindo persada, 2002), h.121.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

1. Menurut simons, penganiayaan dapat dihukum karena dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Menurut Zevenberg, penganiayaan belum tentu dapat dihukum. Sebab apabila terhadap hal-hal yang memang membolehkan, perbuatan itu tidak perlu dihukum, misalnya memukul anaknya dengan tujuan mendidik anaknya.
3. Van hammel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak, tidak dihukum. sehubungan dengan itu harus dibuktikan apakah perbuatan itu *wederrechtelijk* atau tidak.²⁴

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.²⁵

Menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.²⁶

²⁴ Leden, marpaung. *Asas - Teori - Praktik hukum pidana* (Cet.6 ; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 46.

²⁵ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi (cet: 8; Jakarta, Pt Rineka Cipta, 2008), h. 125.

²⁶ Satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/delik-penganiayaan dan,htmlm1

Oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini para ahli maka hukum pidana Indonesia membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada *memorie vantoeliching*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan

Kualifikasi ancaman pidana yang dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dikategorikan dalam bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan direncanakan terlebih dahulu.

Untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit kepada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain,
3. Merugikan kesehatan orang lain,

Dengan kata lain, orang harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan kepada orang lain. Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan penganiayaan. Tetapi, jika perbuatannya itu

telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau terganggu kesehatannya, maka barulah dapat dipersalahkan dalam pasal 351 KUHP.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah melakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, yakni misalkan seseorang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiyaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan kepada perbuatannya untuk membuat orang lain merasa sakit atau kesehatannya terganggu, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.

Hal mana secara tegas dinyatakan oleh Hoge Raad, yang mengatakan sebagai berikut. Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiyaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus itu *opzet* pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah

ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan seorang oleh seorang petugas.²⁷

Contoh dari suatu dimana *opzet* dari pelaku telah ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain misalnya perbuatan memukul seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau untuk memperoleh pengakuan dari seorang tersangka.

Sedangkan contoh dari suatu penganiayaan dimana *opzet* dari pelaku telah tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu misalnya, perbuatan melempar mangga dengan batu, dimana dibawah pohon mangga ada anak-anak yang sedang bermain. Pada waktu batu itu terjatuh ternyata mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar tidak terjadi yakni berupa rasa sakit terhadap orang lain. Seperti yang telah dijelaskan diatas walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.

Simons mengatakan bahwa berdasarkan pengertiannya yang paling tepat mengenai penganiayaan dan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, suatu

²⁷ P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, *Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.133.

tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan jika tindakan itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan untuk itu sendiri tidak meniadakan sifatnya tindakan tersebut sebagai penganiayaan. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan yang mendatangkan rasa sakitnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh pembedanya dalam suatu tujuan yang dapat dibenarkan maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penganiayaan.

Jadi dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan harus ditujukan kepada orang lain, tidak terhadap hewan atau binatang dan harus ditujukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka atau menyebabkan kesehatan seseorang yang rusak, dalam pengertian bahwa itu harus ditujukan pada badaniah (jasmani), jadi rasa sakit yang sifatnya rohaniah, misalnya rasa sakit karena putus cinta dan lain sebagainya itu tidak dikategorikan sebagai penganiayaan. Selanjutnya bahwa perbuatan dimaksud diatas, harus merupakan suatu maksud dan tujuan dari pelaku terhadap diri korban.

2 .unsur-unsur penganiayaan

untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain

- a. dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku,
- b. menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) luka pada orang lain,

- c. merusak kesehatan orang lain,
- d. jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah.

Maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat

3. Jenis-jenis tindak penganiayaan

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam bab ke-XX buku ke-II KUHP, yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yaitu :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - a. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - b Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam rumusan pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahawa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-

unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet, atau suatu kesengajaan untuk;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau,
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Prof. van Haltum dan Prof Bammel memiliki pendapat yakni :

- a. Bahwa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit dan atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan penganiayaan.

- b. Bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar yang meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya Prof. Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan. Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pembenaran pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut Prof. Simons, tindakan tersebut dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP :

Kecuali tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau yang menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebutkan sebagai tindak pidana ringan, tindak pidana tersebut hanya memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
 1. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
 2. Terhadap seseorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
 3. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
 4. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Direncanakan Lebih Dulu

Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KHUP yaitu :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah unsur *voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan terlebih dahulu.

Menurut prof. Simons, unsur *voorbedachte raad* itu dianggap sebagai telah dipenuhi oleh pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu juga ia telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu.

Memorie van toelichting sendiri mengatakan bahwa kata *voorbedachte raad* itu sudah jelas artinya, hingga tidak diperlukan lagi penjelasan lebih lanjut, kecuali bahwa adanya *voorbedachte raad* itu disyaratkan adanya suatu jangka waktu untuk merencanakan secara tenang dan mempertimbangkan kembali dengan tenang.

Unsur lain yang tidak kalah penting di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 353 KUHP itu ialah unsur *luka berat* atau unsur *zwaar lichamelijk letsel*, yakni yang terdapat di dalam rumusan pasal 353 ayat (2) KHUP.

Didalam pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, masing-masing sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa,

2. Ketidackakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus,

- a. Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indera,
- b. Lumpuh,
- c. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan
- d. Keguguran atau kematian janin dalam kandungan seorang wanita.

Voorbedachte raad di dalam rumusan pasal 353 ayat (1) KUHP itu mempunyai kedudukan yang tidak sama dengan *voorbedachte raad* di dalam rumusan 340 KUHP. Jika didalam rumusan KUHP 340, *voorbedachte raad* itu merupakan unsur dari tindak pidana *moord*, maka didalam rumusan 353 ayat (1) KUHP *voorbedachte raad*, bukan merupakan unsur tindak pidana penganiayaan melainkan ia hanya merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana (*starfverzwaarende omstanding*) dari tindak pidana penganiayaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 351.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Direncanakan Terlebih Dulu

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP :

1. penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dulu itu merupakan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti pasal 354 KUHP, yang karena didalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat.

D.Ketentuan Pidana yang mengatur tentang perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua/wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Dan perlakuan salah lainnya,

Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Pasal yang mengatur penganiayaan diatur khusus dalam pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sementara, sanksi bagi yang melanggar pasal diatas (pelaku kekerasan/ pengananiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00, (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00, (seratus juta).
3. dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00, (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan apabila yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kota Makassar yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Yuridis (*Statute approach*).

Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Pidana Anak (KUHP).

2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus yaitu berarti penelitian yang menekankan untuk dilakukannya telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi dilapangan yaitu menganalisis suatu kasus putusan pengadilan yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 242/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Makassar.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, kaya ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai sumber lainnya yang terkait dan membangun penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu :

1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung.²⁸

²⁸Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58

2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logikanya.²

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.³

Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

3. Alat Tulis

²Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

³Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306.

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu :

1. Reduksi data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar

Gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Makassar, dalam hal ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dari salah satu panitra muda hukum di pengadilan Negeri Makassar yaitu Mustari dan menyarankan untuk membuka web pengadilan negeri makassar, dan hasil yang didapatkan yaitu sesuai yang dipaparkan penulis di bawah ini :

1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan yakni tepatnya tahun 1916, pada awalnya berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi rakyat pra bumi, pengadilan Negeri Makasar juga menjadi tempat untuk mencari tempat keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan Negeri Makassar masih kental dengan corak khas belanda tersebut termasuk diantara situs-situs *heritage* (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh Pemerintahan Kota Makassar.

Pengadilan Negeri Makasar merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Dan berikut merupakan susunan ketua pengadilan negeri makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa yang sempat penulis dapatkan :

1. R. Harsadi Darsokusomo periode jabatan 1965-1969
2. Abdul Samad,SH periode jabatan 1969-1973
3. Andi Tahir Hamid,SH periode jabatan 1980-1982
4. Slamet Rijianto,SH periode jabatan 1982-1984
5. J.Serang,SH periode jabatan 1984-1985
6. Ms.Lumme,SH periode jabatan 1985-1987
7. Rijanto,SH periode jabatan 1987-1990
8. Isno Suseno, SH periode jabatan 1990-1993
9. Imam Soekrno,SH periode jabatan 1994-1995
10. H.Soeharto,SH periode jabatan 1995-1996
11. SjamsubrilmManan,SH periode jabatan 1996-1998
12. Soewito,SH periode jabatan 1998-2000
13. Ismed Ilahode,SH periode jabatan 2000-2002
14. H.Haryono,SH periode jabatan 2002-2004
15. Hj.A.Haedar,SH periode jabatan 2004-2006
16. Sudirman Hadi,SH periode jabatan 2006-2007
17. Soeroso Ono,SH.,MH periode jabatan 2007-2008
18. Asli Ginting periode jabatan 2009-2010
19. H.Makkasau,SH.,MH periode jabatan 2010-2012
20. H.Andi Isna Reniswari C,SH,MH periode jabatan 2012-2015
21. Baso Rasyid,SH,MH, periode jabatan 2017

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar masuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi Sulawesi selatan dan barat dengan luas wilayah kurang lebih 300,45 Kilometer yang terdiri dari 14 kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ujung Pandang
- b. Kecamatan Makassar
- c. Kecamatan Mariso
- d. Kecamatan Mamajang
- e. Kecamatan Bontoala
- f. Kecamatan Wajo
- g. Kecamatan Tamalate
- h. Kecamatan Rappocini
- i. Kecamatan Panakuk kang
- j. Kecamatan Maggala
- k. Kecamatan Ujung Tanah
- l. Kecamatan Tallo
- m. Kecamatan Biringkanaya
- n. Kecamatan Tamalanrea

Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Negeri Makassar. Ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan negeri makassar juga bertindak ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan khusus tersebut. Adapun wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan Niaga Makassar
 - 1) Sulawesi Selatan dan Barat
 - 2) Sulawesi Tengah
 - 3) Sulawesi Tenggara
 - 4) Sulawesi Utara
 - 5) Maluku Irian Jaya
- b. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar:
 - 1) Sulawesi Selatan dan Barat
 - 2) Sulawesi Tenggara
 - 3) Sulawesi Tengah
 - 4) Sulawesi Utara
 - 5) Gorontalo
 - 6) Maluku
 - 7) Maluku Utara
 - 8) Irian Jaya
- c. Pengadilan hubungan industri pada Pengadilan Negeri Makassar daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi selatan.

Visi

“mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung”

Misi

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain.

- c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan bermoral.
- e. Melaksanakan kekuatan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

B. Penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi putusan No.242/ pid. Sus-anak/ 2015/ PN .Makassar)

1. Identitas Terdakwa

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidan materil dan formil dalam kasus putusan 242/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Makassar maka perlu diketahui terlebih dahulu idenditas terdakwa yakni :

Nama lengkap : Wingky Juliem Tianglangi Alias Wingky

Tempat Lahir : Makassar

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/10 Juli 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tanggal : Kompleks Perumahan Telkomas Jalan Palpa 5 Nomor
121 Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar,

Agama : Kristen Katolik

Pekerjaan :pelajar SMA Kristen Elim

Pendidikan :SMA(Kelas1)²⁹



²⁹Putusan Pidana Nomor : 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MKS.

1. Posisi Kasus

Bermula ketika jam pulang sekolah, anak (Wingky Juliem Tianglangi alias wingki) bersama dengan teman-temannya dari siswa SMA Kristen Elim sementara nongkrong dipinggir jalan disamping sekolahnya. Tiba-tiba datang rombongan dari siswa SMA Cokroaminoto dan melakukan pelemparan balik dengan menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran saling lempar batu dan saling busur.

Kemudian anak (Wingky Juliem Tianglangi alias wingki) melihat salah satu temannya berkelahi dengan korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada disamping kanan korban lalu anak (Wingky Juliem Tianglangi alias wingki) mendekati dan langsung memukul korban dengan kepalan tangannya berkali-kali mengenai bagian muka dan bahu korban sementara Kristian Raynaldo Alian tian juga berada di tempat tersebut pun memukul dengan menggunakan kepalan tangannya ke arah kepala korban berkali-kali sehingga korban terjatuh.³⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

³⁰ Putusan Pidana Nomor : 242/Pid.Sud-Anak/2015/PN.MKS.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang di buat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas *oportunitas* yang memberikan hak kepada Jaksa penuntut umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dakwaan kesatu :

Bahwa anak **Wingky Juliem Tianglangi Alias Wingy**, secara bersama-sama dengan Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian dan Heri Sangka alias Bebe (yang diajukan dengan berkas perkara yang terpisah), pada hari sabtu tanggal 03 oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang berdampingan dengan balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis kemerdekaan kecamatan Tamalanrea kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, terdakwa *dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yaitu Arsyam, yang di lakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan teman-temannya dari SMA Kristen Elim sementara nongkrong dipinggir jalan di samping sekolahnya tiba-tiba datang rombongan dari SMA Cokroaminot dan

melakukan pelemparan balik dengan menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran dan saling lempar batu dan saling busur

- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul korban dengan kepala tangannya berkali-kali dan mengenai bagian muka dan bahu korban sementara Kriatian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian jga berada ditempat tersebutpun memukul dengan menggunakan kepala tangannya ke arah kepala korban berkali-kali sehingga korban terjatuh.
- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud melarikan diri tiba-tiba heri Sakti Sangka Alias Babe langsung melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan mengenai pelipis sebelah kiri korban
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Fachrulsyah Farid,Sp.BSM.Kes adalah dokter ahli bedah saraf, dr.M.Faisal Muchtar,Sp.An. KIC adalah dokter ahli anestesi dan dr. Jerny Dase,SH,SP.F.M.Kes adalah dokter ahli kedokteran forensic dan Medikolegal, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap dikepala sebelah kiri
 2. Busur/anak tersebut terletak satu centimeter disebelah kiri ari tepi luar mata kiri

3. Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus bagian dalam kepala
4. Hasil CT scan kepala menunjukkan gambaran benda asing bagian depan kiri kesan memasuki rongga kepala
5. Hasil operasi kepala ditemukan benda asing masuk ke jaringan otak bagian depan
6. Ditemukan bekuan darah di dalam sel otak
7. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam dengan benda berujung tajam
8. Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi otak yang membahayakan jiwa korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Dakwaan kedua :

Bahwa anak **Wingky Juliem Tianglangi Alias Wingky**, secara bersama-sama dengan Kristian raynaldo Alias Aldo Alias Tian dan Heri Sakti Sangka Alias Bebe (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang berdampingan dengan Balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, terdakwa *dilarang menempatkan,*

membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Arsyam yang mengakibatkan luka berat , yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan teman-temannya dari SMA Kristen Elim sementara nongkrong dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang rombongan dari SMA Cokroaminot dan melakukan pelemparan balik dengan menggunakan batu sehingga terjadilah tawuran dan saling lempar batu dan saling busur
- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul korban dengan kepalan tangannya berkali-kali dan mengenai bagian muka dan bahu korban sementara Kriatian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian jga berada ditempat tersebutpun memukul dengan menggunakan kepalan tangannya ke arah kepalah korban berkali-kali sehingga korban terjatuh.
- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud melarikan diri tiba-tiba heri Sakti Sangka Alias Babe langsung melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan mengenai pelipis sebelah kiri korban
- Bahwa kemudian pada saat itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo karena mengalami luka tusuk dibagian pelipis,
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka sebagaimana diuraikan Fachrulsyah Farid,Sp.BSM.Kes adalah dokter ahli bedah saraf, dr.M.Faisal Muchtar,Sp.An. KIC adalah dokter ahli anestesi dan dr. Jerny

Dase,SH,SP.F.M.Kes adalah dokter ahli kedokteran forensic dan Medikolegal, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap dikepala sebelah kiri
2. Busur/anak tersebut terletak satu centimeter disebelah kiri ari tepi luar mata kiri
3. Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus bagian dalam kepala
4. Hasil CT scan kepala menunjukkan gambaran benda asing bagian depan kiri kesan memasuki rongga kepala
5. Hasil operasi kepala ditemukan benda asing masuk ke jaringan otak bagian depan
6. Ditemukan bekuan darah di dalam sel otak
7. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam dengan benda berujung tajam
8. Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi otak yang membahayakan jiwa korban.

Dakwaan ketiga :

Bahwa anak **Wingki Juliem Tianglangi Alias Wingki**, secara bersama-sama dengan Kristian Raynaldo alias Tian dan Heri Sakti Sangka alias Bebe (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon yang berdampingan dengan balla Tamalanrea tepatnya di jalan perintis

Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, terdakwa ***dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*** yaitu Arsyam ***yang mengakibatkan mati***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan teman-temannya dari siswa SMA Kristen Elim sementara nongkrong dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang rombongan dari siswa cokroaminoto dan melakukan pelemparan balik dengan menggunakan batu sehingga terjadila tawuran saling leper batu dan saling busur.

- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan korban Arsyam Syam yang mana posisi anak sementara berada disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul korban dengan kepala tangannya berkali-kali dan mengenai bagian muka dan bahu korban sementara kristian raynaldo alias tian berada di tempat tersebut pun memukul dengan menggunakan kepala tangannya kea rah korban berkali-kali sehingga korban terjatuh.
- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri bermaksud melarikan diri tiba-tiba heri sakti sangka alias babe langsung melepaskan anak panah dengan busur kearah wajah korban dan mengenai pelipis sebelah kiri korban.
- Bahwa kemudian pada saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo karena mengalami luka tusuk dibagian pelipis.
- Bahwa kemudian korban dilarikan ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo untuk dilakukan perawatan dan setelah 4 (empat) hari dirawat, korban

meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor Registrasi 2707IFK/RSWS/X/2015.

- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fachrulsyah Farid,Sp.BSM.Kes adalah dokter ahli bedah saraf, dr. M.Faisal Muchtar,Sp.An.KIC adalah dokter ahli anestesi dan dr.Jerny Dase SH,SP.F,M.Kes adalah dokter ahli kedokteran forensic dan medikolegal,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap dikepalah sebelah kiri
2. Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter disebelah kiri dari tepi luar mata kiri
3. Busur/anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus bagian dalam kepala
4. Hasil CT scan kepala menunjukkan gambaran benda asing bagian depan kiri kesan memasuki rongga kepala.
5. Hasil operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk hingga jaringan otak bagian depan.
6. Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak
7. Akibat luka tersebut maka menyebabna kerusakan fungsi otak yang membahayakan jiwa korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak.³³

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan pasal 182 KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian persidangan pidana selesai dilakukan.

Surat tuntutan itu sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan *requisitor* adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terbukti dipersidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa dan disertai dengan tuntutan pidana. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat tuntutan:

1. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebutkan sumbernya

Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam putusan 242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Makassar, dapat dilihat tuntutan Jaksa penuntut umum dengan register perkara Nomor PDM-91/R.4.10/Euh.2/11/2015 tertanggal 19 November. Yang pada pokoknya meminta majelis hakim untuk memutuskan :

³³ Putusan Pidana No.242/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks.

1. Menyatakan terdakwa Wingky Juliem Tianglangi Alias Wingki bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap seseorang anak yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, seperti.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dipotong selama anak berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. (satu) batang busur panjang lebih kurang 12 cm
5. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

5.Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang RI 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan

MENGADILI :

1. Menyatakan anak **WINGKY JULIEM TIANGLANGI Als WINGKY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati
2. Menjatuhkan pidana kepada anak **Wingky juliem tianglangi Als.Wingky** tersebut oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 08 (delapan)bulan.

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) batang busur 12 Cm, dengan pangkal terdapat umbai tali rapia warna merah dan ujungnya runcing, dipergunakan dalam perkara HERI SAKTI SANGKALA Als BEBE.
6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah)

6. Analisis Penulis

Dakwaan disusun dengan cara merangkaikan perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang harus disusun oleh jaksa penuntut umum haruslah memenuhi persyaratan baik formil maupun materil, sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat (3) huruf a KUHP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan.
2. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Adapun syarat-syarat materil surat dakwaan adalah :

1. Tindak pidana yang dilakukan

2. Siapa yang melakukan tindak pidana
3. Dimana tindak pidana dilakukan
4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana dilakukan
6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil)
7. Apa-apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan

Dalam surat dakwaan uraiannya harus jelas, maksudnya adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana di dakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/plager*), pelaku peserta (*mede dader/plager*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplicthing*). Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Jelas berarti harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan
2. Fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik
3. Cara perbuatan materil dilakukan.

Setelah melihat putusan Pengadilan Negeri Makassar No 242/PID.SUS.-Anak/2015/PN.Makassar. dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan alternatif. Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dikenakan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Apabila dikaitkan dengan posisis kasus maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah siapa saja subjek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuat

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak itu sendiri mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi anak yang dihadirkan kedepan persidangan adalah benar-benar subjek hukum sebagaimana di dalam surat dakwaan.

Kemudian anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan anak tidak sedang terganggu pikirannya dengan demikian anak memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga anak dapat dikategorikan sebagai orang.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Unsur ini bersifat fakultatif artinya bahwa tindak pidana dalam unsur ini dapat dilakukan dengan salah satu cara atau kesemua perbuatan dalam unsur ini. Yang dimaksud turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang pelaku yaitu yang melakukan perbuatan dan orang yang kemudian turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa anak bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempari batu dan memukul korban pada bagian bahu serta punggung sehingga korban terjatuh. Dari perbuatan anak beserta teman-temannya merupakan sebuah upaya turut serta melakukan kekerasan terhadap anak karena dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terbukti secara sah

3. Yang mengakibatkan mati

Dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa anak bersama teman-temannya melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara melempari batu, memukul bahu dan punggung korban berkali-kali hingga melempar busur kepada korban. Dimana busur yang dilepaskan oleh anak dan teman-temannya mengenai pelipis kepala sebelah kiri korban yang menyebabkan korban harus dibawa ke rumah sakit. Akibat perbuatan anak dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Facrulsyah Farid, adalah dokter ahli Beda Saraf, dr. M. Faisal Muchtar, Sp.An.KIC adalah dokter ahli anestesi dan dr. Jerny Dase,SH,SP,F,M.Kes adalah dokter ahli forensik dan medikolegal. Kemudian setelah 4 (empat) hari dirawat di Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo, korban meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2015 berdasarkan surat keterangan meninggal nomor register :2707/IFK-RSWS/X/2015. Akibat perbuatan anak bersama teman-temannya mengakibatkan anak meninggal dunia. Maka unsur yang menyebabkan mati terbukti secara sah

Berdasarkan hasil analisis penulis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti satu (1) busur, dan juga alat bukti surat yaitu *visum et repertum* Nomor HK.04.01/1.19/7585/2015 serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung dan bila semuanya dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Namun penulis berpendapat bahwa ada kekeliruan dalam penerapan hukum oleh hakim yang terdapat

dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum tidak menJuntokan Pasal 76C Undang-Undang Perlindundang Anak. Sedangkan di dalam surat dakwaan unsur tindak pidananya ada tiga yakni:

1. Setiap orang
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang menyebabkan mati.

Penulis tidak menemukan unsur ke-dua di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Tahun 2014, melainkan unsur kedua terdapat di dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis berpendapat seharusnya dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Pasal 80 ayat (3) juncto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentan g Perlindungan Anak.

C. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi putusan No.242/ pid. Sus-anak/ 2015/ PN. Makassar)

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sesuai dengan dakwaan jaksaan penuntut umum No.Register. perkara :PDM-91/R.4.10/Euh.2/10/2015. Yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa anak WINGKY JULIEM TIANGLANGI ALIAS WINGKY, secara bersama-sama dengan Kristian Aynaldo alias Aldi Tian dan Heri Sakti Sangka alias Bebe (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 03 oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan salon Yang berdampingan dengan Balla Tamalanrea tepatnya di jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalenrea kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Makassar, terdakwa ***dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*** yaitu arsyam ***yang mengakibatkan mati***. Yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika jam pulang sekolah, anak bersama dengan teman-temannya dari SMA Kristen Elim sementara nongkrong dipinggir jalan disamping sekolahnya tiba-tiba datang SMA Cokroaminoto dan melakukan pelemparan balik dengan menggunakan batu sehingga terjadila tawuran saling leper abut dan saling busur
- Bahwa kemudian anak melihat salah satu temannya berkelahi dengan korban arsyam syam yang mana posis anak sementara berada disamping kanan korban lalu anak mendekati dan langsung memukul korban debgan kepalan tangannya berkali-kali dan mengenai bagian muka dan bahu korban sementara Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian juga berada ditempat tersebutpun memukul dengan menggunakan kepalan tangannya kea rah korban berkali-kali sehingga terjatuh.

- Bahwa pada saat korban terjatuh lalu kemudian berdiri dan bermaksud melarikan diri tiba-tiba Heri Sakti Sangka Alias bebe langsung melepaskan anak panah dengan busur ke arah wajah korban dan mengenai pelipis sebelah kiri korban.
- Bahwa kemudian pada saat itu korban langsung di bawah ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo karena mengalami luka tusuk di bagian pelipis
- Bahwa kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk dilakukan perawatan dan setelah 4 (empat) hari dirawat, korban meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2015 berdasarkan surat kematian Nomor Register 2707/IFK-RSWS/X/2015.
- Bahwa sebagaimana perbuatan anak maka korban mengalmi luka sebagaimana diuraikan dalam visumEt Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 oktober 2015 yang ditanda tangai oleh dr.Fachrulsyah Farid,Sp.BSM.Kes adalah dokter ahli bedah saraf, dr.M.Faisal Muchtar,Sp.An.KIC adala dokter ahli anestesi dan dr.Jerny Dase,SH.SP.F.M.Kes adalah dokter ahli kedokteran forensik dan medikolegal. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Terdapat satu buah anak panah (busur) yang mencap dikepala sebelah kiri.
 2. Busur/anak panah tersebut terletak satu sentieter disebelah kiri dari tepi luar mata kiri.³⁴
 3. Busur atau anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus bagian dalam kepala.

³⁴ Putusan Pidana Nomor : 242/PID.SUS-Anak/2015/PN.MKS

4. Hasil CT scan menunjukkan gambaran benda asing bagian depan kiri kesan memasuki rongga otak bagian depan.
5. Ditemukan bekuan darah di dalam jaringan otak.
6. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam.
7. Akibat luka tersebut maka menyebabkan kerusakan fungsi otak yang membahayakan jiwa korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksia satria
2. Saksi asbar
3. Saksi Andi Aksa bin Bakri
4. Saksi Yogi Pratama Putra Alias Yogi Bin Ilyas
5. Saksi Heri Sakti Sangka Alias Bebe
6. Saksi Kristian Raynaldo Alias Aldo Alias Tian

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) batang busur lebih kurang 12 cm dengan pangkal terdapat umbali tali rapia warna merah dan ujungnya runcing.

Menimbang terdakwa sebagaimana terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut

Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa Karena surat dakwaan penuntut umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, maka majelis hakim memilih dakwaan mana menurut majelis hakim terbukti dipersidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan penuntut umum yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan 3, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang rumusannya setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati,³⁵ maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang

³⁵ Putusan Pidana Nomor : 242/PID.SUS-Anak/2015/PN.MKS

perlindungan anak, maka rumusan deliknya (element delict) atau unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang mengakibatkan mati

Ad.1). unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak sendiri mengakui puka identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi anak yang diadirkan didepan persidangan adalah benar subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatannya dan dalam menjalani persidangan anak sedang tidak terganggu pikirannya sehingga dengan demikian anak memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga anak dapat dikategorikan sebagai orang.

Dengan demikian unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2). unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat fakulatif yang berarti bahwa tindak pidana dalam unsur ini dapat dilakukan dengan salah satu cara atau kesemua perbuatan yang terkandung dalam unsure ini.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang pelaku yaitu orang yang melakukan perbuatan dan orang yang kemudian turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempari batu dan memukul korban pada bagian bahu serta punggung sehingga korban terjatuh.

Menimbang bahwa perlakuan anak beserta teman-temannya yang melempari batu dan memukul korban pada bagian bahu serta punggungnya berkali-kali merupakan sebuah upaya melakukan kekerasan terhadap anak

Dengan demikian unsure dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3). yang mengakibatkan mati

Menimbang anak bersama dengan teman-temannya melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara melempari batu dan memukul bahu dan punggung korban berkali-kali hingga melempar busur kepada korban.

Menimbang bahwa busur yang anak dan teman-temannya mengenai pelipis kepala sebelah kiri korban yang menyebabkan korban harus dibawa ke rumah sakit.

Menimbang bahwa akibat perbuatan anak dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/7585/2015 tanggal 09 oktober 2015.

Menimbang bahwa setelah 4 (empat) hari dirawat dirumah sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo, jorban meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2015 berdasarkan surat keterangan meninggal nomor register : 2707/IFK-RSWS/X/2015

Menimbang oleh karena akibat perbuatan anak beserta dengan teman-temannya yang mengakibatkannya korban meninggal dunia, maka unsure mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur yang menyebabkan mati terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang demikian unsure menyebabkan mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut umum pasal 80 ayat (3) UU RI Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa oleh karena anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Hal mana pada diri anak tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pembedaan maka anak harus dihukum

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak,terlebih hakim akan mempertimbangkan saran dari litmas

sesuai dengan surat nomor Reg.Lit/Polsek Tamalanrea/07/X/2015-14 pada tanggal 16 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Untuk sebaiknya anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk didik, dibina karena anak masih ingin melanjutkan sekolahnya atau ditempatkan di lembaga penyelenggaraan keajahteraan sosial (LPKS) paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini panti sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar.³⁶

Menimbang bahwa atas saran dari litmas maka hakim berepndapat karena perbuatan yang dilakukan anak merupakan perbuatan kekerasan yang menyebabkan matinya anak, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang ancaman pidanyan berat.

Menimbang oleh karena perbuatan anak ini merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain maka hakim menganggap anak harus menjalani hukuman pidana penjara demi tercapainya keadilan dan tidak terlepas dari teori-teori pembedanaan.

Hal-hal yang memberatkan

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Hal-hal yang memberatkan

1. keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban.
2. anak bersikap sopan selama persidangan.

³⁶ Putusan Pidana Nomor : 242/PID.SUS-Anak/2015/PN.MKS

3. anak masih sekolah dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri.
4. anak belum pernah dihukum.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang yang telah dipertimbangkan dan apa yang telah menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut. Ada tahapan yang harus dilalui hakim yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa hakim harus berdasar kepada dua alat bukti yang sah yang dimana kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatur dalam pasal 183 KUHP. selain dari pada itu berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor (3) 1997 tentang pengadilan anak, hakim sebelum menjatuhkan putusan hukum terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Selain itu hal penting yang perlu dilakukan hakim adalah untuk dapat dipidanya seorang pelaku haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Yang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seorang akan dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatkannya, tindakan tersebut melawan hukum dan juga tidak ada alasan penghapusan pembedaan terhadap pidana yang dilakukan.

Selain itu dalam menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagaimana diatur

dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengatur tentang isi surat putusan pemidanaan, sebagai berikut :

f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Dalam putusan No. 242/PID.SUS-Anak/2015/PN.Makassar proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) busur serta alat bukti surat berupa visum. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya. Selain hal di atas, hakim juga tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana terhadap yang dilakuakn oleh terdakwa.

Didalam putusan hakim juga mempertimbangkan saran dari litmas sesuai dengan surat Nomor Reg.Lit/Polsek Tamalanrea/07/X/2015 pada tanggal 16 Oktober 2015 yang pada pkoknya menerangkan bahwa :

- Untuk sebaiknya anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk didik dan dibina karena klien masih ingin melanjutkan sekolahnya atau ditempatkan di lembaga Penyelenggaraan kesajahteraan sosial (LPKS) palin lama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini panti sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar.

Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. Keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah di dasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Berdasarkan analisis penulis ancaman pidana oleh hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat yaitu 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan karena mengingat bahwa terdakwa dalam kasus ini hanya turut serta melakukan, terdakwa bukanlah pelaku utama atau penyebab meninggalnya korban, dapat dilihat dari hasil Visum Et Repertum Nomor HK.04.01/1.19/7585/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 yaitu :

1. Terdapat satu buah anak panah (busur) yang menancap dikepala sebelah kiri
2. Busur/anak panah tersebut terletak satu sentimeter disebelah kiri dari tepi luar mata kiri
3. Bususr/anak panah tersebut menyebabkan luka yang menembus bagian dalam kepala
4. Hasil CT scan kepala menunjukkan gambaran benda asing bagian depan kiri kesan memasuki rongga kepala
5. Hasil operasi bedah kepala ditemukan benda asing masuk hingga jaringan otak bagian depan
6. Ditemukan bekan darah di dalam jaringan otaku
7. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam

Akibat dari busur tersebutlah yang menyebabkan meninggalnya korban. Dan jika dilihat dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa hanya memukul meggunakan kepalan tangannya di bagian muka dan bahu korban. Dalam hal ini hakim harus lebih

cermat dalam memperhatikan alat bukti surat Visum. Penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini cukup berat mengingat bahwa terdakwa adalah bukan merupakan penyebab utama meninggalnya korban. Akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap putusan no. 242/pid.sus-anak/2015/Pn.Makassar. menurut penulis terdapat kekeliruan karena dalam penerapan pasal yang didakwakan tidak men-Junctokan Pasal 76 C, sedangkan dalam rumusan deliknya atau unsur-unsur tindak pidanya menyebutkan ada 3 tiga yakni
 - a. Setiap orang
 - b. Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
 - c. Yang mengakibatkan mati.

Dari unsur diatas unsur pertama dan kedua terdapat dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan unsur ke dua tedapat pada pasal 76 C.

2. pertimbangan hakim terhadap putusan no. 242/pid. sus-anak/2015/Pn. Makassar. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang penulis teliti alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan alat bukti surat. Serta hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan bagi terdakwa. Namun penulis menilai ancaman pidana yang dijatuhkan hakim terlalu berat yakni 3 tahun 8 bulan karena mengingat bahwa terdakwa dalam kasus ini bukan penyebab utama kematian korban. Akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan.

B. Implikasi Penelitian

dari hasil kesimpulan dan hasil penelitian tersebut diatas, maka ada beberapa implikasi yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Pihak keluarga merupakan benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan sangat penting dalam mendidik anak.
2. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku di dalam persidangan. Selain itu jaksa penuntut umum haruslah memiliki pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya secara unsur formil, melainkan juga secara unsur materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan.
3. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak serta merta mendasar pada tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan hakim juga harus mempertimbangkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan anak terutama di bidang pendidikan, pembinaan ahklak dan prilaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdssalam, Adri desasfuryanto. *hukum perlindungan anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Adam chazawi. *stelsel pidana tindak pidana teori-teori pembedaan & dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: Pt rJagrafindo persada, 2002.
- Abintoro prakoso. *pembaruan system peradillan pidana anak*. Yogyakarta: aswaja presindo, 2016.
- A.Hanafi. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Depdikbud. *kamus besar bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai pustaka, 1998.
- Hadi Supeno. *kriminalisasi anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hilma Hadikusuma. *bahasa hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992, lihat Darwin parint, *hukum anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Husaini Usman, dkk. *Metode Penelitian Sosial*.Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- <http://balance04.blogspot.co.id/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>
- Imam Juahari. *advokasi hak-hak anak ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*. Medan: Pustaka bangsa, 2008.
- Kementrian Agam RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Leden dan Marpaung .*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. cet.6: Jakarta: sinar grafika, 2009.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: refika Aditama, 2009.

M.Nasir Djamil. *Anak Bukan di Hukum*. Cet. II: Jakarta : sinar grafika, 2013.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi.cet 8: jakarta: Pt Rineka cipta, 2008.

Muh Taufik Makaro dan Weni Bukamo dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ineka cipta, 2013.

Nandang Sambas. *peradilan pidana anak di Indonesia dan instrument internasiaonal perlindungan anak serta penerapan*. Yoyakarta: Graham Ilmu, 2013

P.A.F.Lamintang,Theo Lamintang. *Delik Khusus (Kejahatn Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Parint. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.

Permata press. *KUHP (Kitab Undang-Undan Hukum Pidana)*, 2007.

Putusan Nomor : 242/PID.SUS-Anak/2015/PN.MKS

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Makassar : mitra wacana media, 2014.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 34.

R.Wijoyos. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2016.

Sastrawidjaja Sofjan. *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Jakarta: CV Armico.

Siska lis sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. cet V: Jakarta : T Rineka Cipta, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.



RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini berjudul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota makassar (studi putusan no.242/Pid.Sus/Anak/Pn.Makassar). penulis skripsi ini atas nama Isma Sari Ikbal biasa di panggil Isma, lahir di Enrekang 16 April 1995, anak ke tiga dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri ayah Ikbal dan ibu

Hasmiati. Dan penulis skripsi ini tinggal di dusun papi desa buttu batu kecamatan enrekang kabupaten enrekang. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis skripsi yaitu : Madrasah Ibtidaiyah Negeri papi di desa buttu-batu kec. Enrekang Kab. Enrekang lulus pada tahun 2007, SMP Negeri 4 Enrekang di desa Temban Kec.Enrekang Kab.Enrekang, lulus pada tahun 2010, SMA Negeri 1 Enrekang di Kec.Enrekang Kab.Enrekang pada tahun 2013. Dan mulai tahun 2013 mengikuti program S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi hukum pidana sampai dengan sekarang. sampai dengan saat ini penulis skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, dan insya Allah telah lulus pada tahun 2017

M A K A S S A R